

KEBIJAKAN PENELITIAN UNTUK KEMAJUAN DAERAH: Daya Tarik dan Fasilitas Birokrasi ¹

Research Policy for Regional Development: Bureaucracy Facility and Interest

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

Research activity has been intensively carried out in Indonesia before the 20th century, especially those conducted by European during the colonialism era. Research activity was very much skewed, depending on who did the research or who financially supported the activity. Research is very closely linked with efforts to dig the knowledge and innovation which with these two aspects a community (who conduct the research) has more competitive to progress. Those who own and control research activity would be entitled to lead the progress of civilization and at the same time “regulate” other community livelihood. Policy to facilitate research activity by the regional government is very important, specifically activities directed to accelerate the development of a community and the region and to protect them from all forms of distortion and degradation. Facilities to support “good” research, among others, are the (unlimited) approval, resource support, close guidance, and financial support; while that of “not good” should be controlled with access limitation to many elements, research permit cancellation, and activity banning. Research activities and regional development planning is encourage to be implemented in a highly committed coordination.

Key words : *support, limitation, banning, competitiveness to progress, control of community civilization*

ABSTRAK

Sebelum abad 20 kegiatan penelitian di Indonesia sudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitas penelitian oleh

¹ Isi tulisan dikembangkan dari makalah yang disampaikan dalam acara “Seminar Fasilitas Daerah Dalam Peningkatan Pengawasan Penelitian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, 11 Maret 2010 di Hotel Mercure Rekso, Jakarta Barat.

pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang "baik" antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang "tidak baik" dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi.

Kata kunci : *dukungan, pembatasan, pelarangan, daya saing untuk maju, dan pengendalian peradaban masyarakat*

PENDAHULUAN

Cerita menarik tentang "penelitian" dan "gerilyawan" Jawa. Dalam suatu perkuliahan, Prof Sajogyo (dahulu bernama Kamto Utomo) menceritakan bahwa pemerintah Hindia Belanda, sebelum menginstruksikan angkatan perangnya menyerbu sarang "gerilyawan" di Jawa pada akhir 1940-an, terlebih dahulu mengirimkan peneliti antropologi sosial untuk mengamati keadaan masyarakat pertanian di perdesaan (Pranadji, 2009). Jika dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh gambaran bahwa situasi pertanian padi sawah di perdesaan bagus dan kohesifitas masyarakat perdesaan tinggi, maka penyerangan atau penyerbuan angkatan perang Hindia Belanda cenderung akan sia-sia. Ataupun jika harus dilakukan penyerbuan maka akan dibutuhkan biaya operasi militer sangat tinggi, termasuk risiko jumlah korban tentara relatif besar. Ketersediaan pangan dan solidaritas masyarakat merupakan bagian dari "amunisi esensial" untuk memenangkan suatu pertempuran dan peperangan.

Dalam bukunya *Confession of an Economics Hitman*, Perkins (2004) menyampaikan pengakuan bahwa pada 1980-an John Perkins melakukan kegiatan inteligen (berkedok penelitian) untuk (misi) "menghancurkan" ekonomi Indonesia. Dalam rangka bertugas membantu negaranya (Amerika Serikat) dan lembaga keuangan Internasional (World Bank), dengan caranya ia membujuk tokoh-tokoh politik dan pengambil kebijakan nasional agar melakukan peminjaman uang dalam jumlah besar pada World Bank atau USAID. Dengan berhasil mendorong Indonesia masuk dalam jebakan utang (*debt trap*), maka berbagai kebijakan ekonomi dapat dikendalikan dengan mengikuti kemauan pemberi pinjaman. Kebijakan privatisasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lahan serta sumberdaya alam merupakan bagian dari agenda kepentingan negara besar kapitalis, melalui tangan perusahaan besar atau *Multi National Corporation* (MNC), untuk mengambil manfaat atau keuntungan ekonomi (Perkins, 2009) secara asimetris.

Terjadinya fragmentasi negara "Uni Soviet" menjadi negara-negara kecil beberapa dekade lalu hampir dapat dipastikan bukan sebagai peristiwa alamiah

biasa. Kasus tersebut merupakan bagian dari hasil "rekayasa sistematis" yang dilakukan oleh kalangan perumus kebijakan politik negara-negara di Barat. Dapat dipastikan bahwa rumusan "rekayasa sistematis" tersebut dilandaskan dari hasil (rekomendasi) penelitian yang mendalam dan komprehensif yang melibatkan berbagai kalangan peneliti lintas disiplin. Tidaklah mungkin suatu masyarakat bangsa atau gabungan bangsa dapat melakukan suatu perubahan berskala besar dan sistematis jika tidak dilandaskan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang hebat dan terorganisir dengan baik. Siapa yang menguasai kegiatan penelitian secara baik adalah yang akan memegang kendali "kemenangan" dalam kompetisi atau pertarungan peradaban ("*clash of civilization*").

Kegiatan penelitian dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah atau mengantisipasi suatu kejadian, baik yang tidak dikehendaki (oleh pihak tertentu) maupun yang sangat dikehendaki (oleh pihak tertentu yang lain), yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah atau menggunakan landasan pengetahuan khusus. Umumnya kegiatan penelitian tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, karena harus memperhatikan kaidah digunakannya ilmu pengetahuan mutakhir, cara kerja sistematis, logis, efisien dan efektif (de Groot, 1961). Selain dilakukan oleh tenaga berkeahlian khusus, kegiatan penelitian umumnya memerlukan dukungan sumberdaya ("biaya") yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan penelitian tidak bersifat "netral" dari kepentingan tertentu, terutama penelitian yang terkait dengan aspek sosial-ekonomi, politik, dan keamanan suatu bangsa atau masyarakat daerah.

Tulisan ini berisi analisis kritis tentang (kebijakan) "fasilitasi" kegiatan penelitian untuk kemajuan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang sosio-budaya, ekonomi, dan politik. Fasilitasi ini dinilai penting karena dari kegiatan penelitian akan dapat dihasilkan berbagai pengetahuan baru yang terkait dengan upaya memajukan masyarakat daerah dan bangsa. Bagi pihak tertentu, istilah "memajukan" masyarakat daerah dapat juga diartikan sebaliknya, yaitu "menghambat" atau bahkan "menghancurkan" masyarakat daerah (sebagai awal "menghancurkan" bangsa Indonesia). Kurang lebih dalam pengertian demikian ini kebijakan "fasilitasi" kegiatan penelitian perlu dikaji secara kritis. Fasilitasi yang dimaksud dapat dalam bentuk memberikan izin penuh agar kegiatan penelitian dilakukan, memberikan izin disertai dengan pendampingan atau pengawasan, melarang, mengizinkan secara terbatas, serta ikut membantu agar penelitian dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan masyarakat daerah.

DAYA TARIK PENELITIAN TERHADAP INDONESIA

Hingga kini, bahkan sangat mungkin dalam beberapa dekade mendatang, banyak kalangan menilai bahwa Indonesia itu terlalu "*sexy*" untuk tidak

diperhatikan. Bahkan bagi banyak "orang asing" Indonesia dinilai terlalu menggemaskan untuk tidak didekati dan diambil manfaatnya secara khusus. Dapat dikemukakan bahwa apa saja yang ada di pelosok dunia hampir dipastikan ada di Indonesia. Namun tidaklah berlaku sebaliknya; bahwa apa yang ada di Indonesia belum tentu ada di belahan dunia manapun. Hanya saja, apa yang ada di Indonesia belum sepenuhnya telah tergalikan untuk kemajuan masyarakat daerah dan bangsa. Bahkan orang Indonesia dikenal sebagai orang yang tidak bisa mengurus wilayahnya dengan baik. Bisa dimengerti jika banyak pihak, terutama kalangan luar negeri, sangat berkeinginan ikut andil dalam mengurus (mengambil manfaat dari bumi dan orang) Indonesia.

Belum lama ini ada dua buku bagus berjudul "*The Idea of Indonesia: A History*" Elson (2009) dan "*Nusantara: A History*" (Vlekke, 2009). Dari kedua buku tersebut dapat digambarkan bahwa secara historis apa yang ada dan terjadi di Indonesia mengundang kekaguman pihak (peneliti) asing. Terdapat banyak kekhasan yang didapati pada dinamika sosio-budaya-politik dan bertahannya bangsa Indonesia hingga kini. Dinamika internal, yang menggambarkan jatuh-bangunnya masyarakat Indonesia, sangat menarik dan mengundang keinginan-tahuan yang tinggi masyarakat peneliti sosio-politik luar negeri. Walaupun berbagai aliran pemikiran politik, etnologi, ideologi, sosio-budaya dan ekonomi telah melintasi penggalan-penggalan rejim sejarah ternyata tidak membuat Indonesia menjadi lemah dan hancur. Asumsi bahwa Indonesia terlalu besar; dilihat dari ukuran wilayah, jumlah penduduk, jumlah etnis, kepulauan (besar dan kecil), kepercayaan, serta ekologi; ternyata tidak melemahkan keberadaan Indonesia dalam pergaulan internasional.

Pada saat Indonesia masih muda usia (baru "belajar berjalan") pun dinamika (sosial, budaya, dan politik) sudah merangsang dan mengundang peneliti luar negeri datang. Pada tahun 1950-an masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa, telah menarik para peneliti (mahasiswa doktoral) dari Universitas Harvard. Di bawah kepemimpinan Benyamin Higgins (1912-2001), pada 1950-an serombongan peneliti (kandidat doktor) melakukan penelitian komprehensif tentang tatanan budaya, politik, pemerintahan, dan ekonomi. Salah satu peneliti yang produktif adalah Clifford Geertz, yang menulis beberapa buku, di antaranya adalah: *Religion of Java* (Geertz, 1976) dan *Agricultural Involution* (Geertz, 1970). Ada kemungkinan terjadinya "pergolakan politik 1960-1970" di Indonesia adalah bagian dari implikasi penelitian yang dilakukan "Tim Peneliti Harvard" tersebut.

Dalam perekrutan politik, peran kegiatan penelitian sangat penting. Sebagai gambaran bahwa dalam konteks "penjinakan" masyarakat Aceh, pemerintah Hindia Belanda meminta bantuan Christian Snouch Hurgronje (1857-1936), peneliti sosio-antropologi-politik. Dengan hanya mengandalkan "seorang prajurit" (peneliti), masyarakat Aceh yang sebelumnya secara militer mustahil ditaklukkan selama 2-3 abad, menjadi lebih dapat ditaklukkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Penggunaan "tentara peneliti" ini dilatarbelakangi oleh

betapa mahalny operasi militer untuk menundukkan Pangeran Diponegoro, yang dikenal sebagai Perang Jawa-3 (1825-1830). Beban anggaran pasca Perang Jawa-3 membuat Pemerintah Hindia Belanda sangat menderita beban biaya perang, dan dari pengalaman ini lahir inovasi "tentara peneliti".

Dari segi positifnya, peran kegiatan penelitian juga telah membuat bumi Indonesia dikenal masyarakat global. Selain dari aspek budaya, misalnya masyarakat Bali, dari khasanah ilmu ekologi juga sangatlah nyata. Pada masa Thomas S. Raffles, pada awal abad 19 telah digerakkan penelitian biologi. Para peneliti atau ilmuwan dari Barat diundang Raffles dan sangat tergiur untuk mendalami kekayaan ekologi Indonesia; sebagai bagian dari Asia Tenggara. Sebagai gambaran, peta keragaman ekologi dan hayati Indonesia (*The Ecology of Tropical East Asia*, Colett, 2009; Oxford University Press, London) tidak ditulis atau diteliti oleh orang Indonesia, melainkan oleh kalangan ilmuwan asing (Inggris dan Belanda) pada jaman (Gubernur Jenderal) Thomas S. Raffles.

Daya tarik Indonesia adalah karena kekayaan yang terkandung dalam bumi, air, dan masyarakatnya. Kombinasi antara alam dan masyarakat, mencakup tatanan budaya dan kearifan lokal ("*local wisdom*"), membentuk sinergi yang secara potensial menghasilkan nilai ekonomi, budaya, stabilitas politik regional, dan lingkungan global yang sangat signifikan. Sebagai gambaran, jasa hasil interaksi antara masyarakat petani dan alam (ekologi padi sawah) di Jawa sudah cukup untuk membangun "Amsterdam" pada abad 17-19 (Cahyono, 2009; Pranadji, 2010). Dengan pengetahuan yang digali dari kegiatan penelitian sosio-antropologi pertanian, masyarakat Hindia Belanda berhasil mengambil manfaat dari ekologi budaya Jawa (Geertz, 1970; Pranadji, 2010).

Kegiatan penelitian di bidang ekonomi juga menarik bagi peneliti asing. Sebagai contoh, aliran ekonomi kerakyatan yang dipelopori Prof Mubyarto, juga menarik bagi peneliti asing, di antaranya Prof D.H. Penny. Manfaat peneliti ekonomi asing bukan tidak ada. Sebagai contoh, selain Prof D.H. Penny, hasil penelitian Prof H.W. Arndt (1994), yang dibukukan (berjudul "Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga"), memberikan pandangan segar bagi perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Di sela-sela pandangan antara Prof. D.H. Penny dan Prof H.W. Arndt dapat digali gagasan kreatif dalam bentuk rumusan kebijakan ekonomi yang pro masyarakat banyak dan berbasis pertanian.

Akhir-akhir ini, akibat kehancuran hutan (*deforestation*) tropis (termasuk di Indonesia) telah mengakibatkan perubahan iklim yang serius, masalah pemanasan global ("*global climate change*") menjadi sorotan dunia. Jika daerah-daerah di Indonesia tidak bersedia berpadu untuk mengatasi perubahan iklim atau pemanasan global ("*global warming*") melalui "*reforestation*" yang masif, hal ini akan memperparah "kesengsaraan" masyarakat dunia dan berpotensi menjadi "tragedi bersama" (*tragedy of the common*). Kemampuan penelitian di Indonesia untuk meyakinkan masyarakat global tentang pentingnya "transfer dana" (dari

surplus perdagangan produk industri dari negara-negara di "wilayah utara" ke negara-negara di "wilayah selatan") masih lemah. Sangat mungkin, kemampuan diplomasi pejabat negara di kancah global masih lemah (disebabkan lemahnya kemampuan dalam mengapresiasi hasil penelitian).

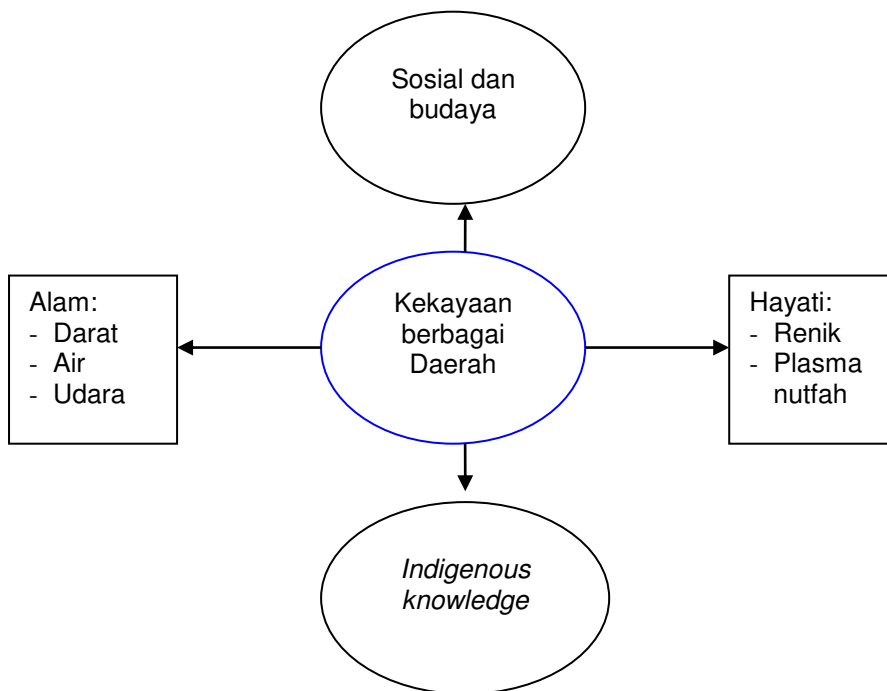
KEKAYAAN: PISAU BERMATA GANDA

Kekayaan masyarakat dan bumi Indonesia, yang tersebar di berbagai daerah dan budaya, sangatlah besar. Jika kekayaan ini dikelola dengan mengikut azas *good governance* benar maka impian Indonesia menjadi bangsa besar Indonesia bukanlah tanpa dasar. Justru karena kekayaan ini banyak pihak ingin memperoleh manfaat, baik dengan cara yang menggunakan norma pergaulan dunia yang wajar ataupun dengan cara yang tidak terpuji. Pengalaman Indonesia dijajah, secara ekonomi dan politik, selama lebih dari 3 abad menunjukkan bahwa kekayaan yang ada di Indonesia membuat pihak luar negeri tidak mampu menahan diri untuk mencampuri kedaulatan masyarakat Indonesia. Ketika beberapa raja kecil di Indonesia membuka diri bekerjasama, maka naluri ekonomi pihak luar negeri untuk mengambil keuntungan ekonomi secara sistematis mendapat tempat.

Perbedaan budaya dan penguasaan modal finansial yang relatif besar membuat pihak asing dapat membangun jaringan ekonomi pasar secara monopsinistik. Umumnya raja-raja kecil di banyak tempat belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam perdagangan hasil pertanian secara internasional. Hal ini secara tidak langsung menjadi titik lemah masyarakat Indonesia dalam persaingan memperebutkan nilai ekonomi sumberdaya alam dan masyarakat dengan pihak asing. Dengan masuknya budaya industrialisasi dan ekonomi pasar dalam peradaban masyarakat agraris tradisional di Indonesia, khususnya di Jawa dan Sumatera, ketimpangan dalam persaingan menjadi semakin tajam. Ketimpangan ini mengarah pada timbulnya ketegangan hubungan antar masyarakat yang berbeda tingkat peradaban ekonominya. Kekayaan alam yang besar, namun tanpa disertai dengan penjagaan yang kuat secara potensial mengundang bencana sosial, politik, ekonomi, dan pada akhirnya bencana kemanusiaan.

Indonesia mempunyai keragaman daerah yang relatif tinggi. Keragaman setiap daerah dapat dielaborasi dalam aspek ekologis, geografi, kependudukan, latar belakang historis, dan sosio-budaya. Secara umum pada masing-masing daerah dapat ditemukan kandungan kekayaan yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk kemajuan kemanusiaan di daerah dalam jangka panjang. Siapa yang mampu menggali dan memanfaatkan kekayaan tersebut maka mereka-lah yang akan mengambil keuntungan lebih. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai berbagai kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai: kekayaan alam, hayati, *indigeneous knowledge (and people)*, sistem peralatan, dan budaya (Gambar 1).

Dari empat katagori kekayaan di daerah seperti ditunjukkan pada Gambar 1, masih dapat dirinci sebagai berikut: *pertama*, kekayaan alam berupa hasil tambang (misalnya: emas, bijih besi, minyak dan gas bumi, batu bara, boksit, serta nikel), dan mineral permukaan (misalnya pasir, batu, dan tanah), dan air. *Kedua*, kekayaan hayati mencakup jasad renik, satwa langka, dan berbagai tanaman (misalnya Anggrek Hutan) atau satwa eksotik (misalnya burung Cenderawasih). *Ketiga*, kekayaan sosio-budaya mencakup hasil seni (misalnya berupa patung, lukisan dan gamelan), keindahan hasil kerajinan tangan, dan makanan. *Keempat*, kekayaan spesifik dari pengetahuan lokal mencakup pengetahuan tentang iklim, laut, dan perbintangan (untuk navigasi pelayaran dan penentuan jadwal tanam pertanian).



Gambar 1. Kekayaan Daerah Menurut Katagori yang Banyak Dijumpai di Lapangan

Rasa iri dan cemburu merupakan bagian naluri manusia dan masyarakat yang hampir selalu mewarnai dinamika internal dan eksternal suatu masyarakat. Rasa iri yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya berbagai pencurian dan perampasan kekayaan masyarakat daerah dan bangsa. Beberapa kejadian yang merugikan masyarakat daerah dan bangsa, antara lain ditunjukkan:

- a. Hak paten tentang makanan tradisional, tempe, telah diambil alih secara sepihak oleh masyarakat (peneliti) Jepang.
- b. Lagu "Terang Bulan" dijadikan lagu kebangsaan oleh negara tetangga, tanpa meminta persetujuan masyarakat daerah bersangkutan dan bangsa Indonesia.
- c. Alat musik angklung, berasal dari daerah Jawa Barat, secara sepihak juga diakui sebagai milik "orang lain" tanpa ada permintaan atau persetujuan.
- d. *Reog Ponorogo*, milik masyarakat Jawa Timur, konon juga diakui secara sepihak oleh "orang lain" tanpa permissi atau basa-basi orang timur.
- e. Konon batik, sebagai produk budaya Indonesia, juga diakui sebagai khasanah budaya "orang lain" tanpa ada pembicaraan ataupun permintaan ijin.

Contoh di atas masih dapat diperpanjang, namun intinya bahwa "kekayaan" dapat memancing pihak lain untuk memiliki dengan cara-cara yang aneh. Kasus pencurian plasma nutfah oleh pihak asing telah sangat banyak terjadi, namun kita belum kuasa menghalanginya secara sistematis. Demikian juga, misalnya, informasi berupa peta daerah yang mempunyai kandungan mineral berharga (misalnya emas) juga banyak diperoleh orang asing dengan berkedok sebagai "peneliti" lingkungan. Kegiatan penelitian di daerah sangat mungkin "ditunggangi" oleh kepentingan "asing" yang berujung pada kerugian bagi masyarakat daerah dan bangsa Indonesia.

Kegiatan penelitian sering dilakukan sebagai awal untuk merancang "rekayasa sosial-budaya-politik" pada masyarakat di daerah tertentu. Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris, perekayasaan semacam ini (berbasis penelitian) sudah banyak dilakukan. Penulis diundang oleh beberapa kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia untuk menganalisis tentang berbagai tindak kerusuhan atau "keributan" di berbagai daerah. Dari informasi intelijen dapat diperoleh gambaran bahwa pada kasus keributan di Poso, Ambon, Papua, dan (bahkan) Timur Timor sangat mungkin diawali dengan penelitian yang mendalam dan komprehensif terhadap masyarakat tersebut. Gerakan separatis, disintegrasi, ataupun gerakan anti keutuhan Indonesia merupakan bagian dari rekayasa sosial-budaya-politik yang didukung penelitian khusus.

MEMBANGUN KECERDASAN MASYARAKAT

Berkembangnya kegiatan penelitian di suatu masyarakat akan menggambarkan tentang keterbukaan masyarakat tersebut terhadap inovasi. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang menghargai inovasi, karena dapat dikatakan bahwa tanpa inovasi tidak akan ada kemajuan. Dalam satu dekade terakhir, kegiatan penelitian telah menjadi bagian yang tidak lagi asing bagi masyarakat di berbagai daerah. Telah banyak lembaga penelitian non pemerintah

yang telah secara intensif melakukan penelitian yang terkait dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Lembaga-lembaga seperti CSIS, LP3ES, KOMPAS, Media Group, dan LSI telah dikenal luas melakukan kegiatan penelitian di masyarakat daerah. Diperkirakan lebih dari 300-an lembaga non pemerintah yang melakukan penelitian di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Sebagai peneliti, penulis sering dimintai pendapat berbagai kalangan mengenai perkembangan ”pengetahuan mutakhir” bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai daerah. Berbagai kalangan tersebut mencakup tokoh masyarakat, orang-orang awam yang pintar, pejabat pemerintah, dan elit politik di pusat dan daerah. Hal ini sangat berbeda dibandingkan (misalnya) 15-20 tahun lalu, kegiatan penelitian masih belum dianggap sebagai pekerjaan yang penting. Bahkan banyak kalangan pemerintah pun menilai bahwa kegiatan penelitian hanyalah pekerjaan buang-buang waktu. Penulis tidak dapat membayangkan, apa jadinya jika ada rombongan peneliti asing (sosial, budaya, dan politik) melakukan penelitian intensif pada masyarakat di daerah konflik? Jangan-jangan peneliti tersebut dianggap melakukan spionase untuk upaya memecah belah dan mengganggu ketenangan masyarakat.

Ketika penulis melakukan penelitian lapangan dengan turun langsung di pedesaan, umumnya para aparat dan tokoh masyarakat menanyakan tentang judul penelitian, kegunaan penelitian (pada masyarakat), daftar pertanyaan yang digunakan, serta bagaimana menganalisis informasi yang dikumpulkan di lapangan. Bahkan, tanpa penulis sadari, seringkali masyarakat bukan saja ingin menguji ”kepakaran” penulis, melainkan juga menggali pengetahuan tertentu dari penulis. Dengan diskusi interaktif, masyarakat mendapatkan gambaran tentang apa yang penulis inginkan, dan sekaligus ”menggali” pengetahuan dari penulis. Bahkan, seringkali, masyarakat tidak segan-segan mengkritik dengan pedas tentang tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan penelitian.

Kecerdasan masyarakat daerah akhir-akhir tentang pentingnya penelitian telah meningkat semakin pesat. Dalam beberapa kasus penulis sering diminta memaparkan hasil penggalian informasi di suatu daerah oleh masyarakat setempat. Beberapa kalangan dari masyarakat di daerah banyak yang haus informasi atau hasil analisis yang dapat memperkaya pengetahuan mereka, khususnya yang terkait dengan ekonomi, politik, dan budaya. Pendeknya, dilihat dari segi pendidikan dan budaya politik, dalam satu dekade terakhir mereka telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Jika dinilai hasil penggalian informasi bagus, tidak segan-segan para tokoh masyarakat meminta penulis menyajikan hasil analisis sementara suatu kegiatan penelitian. Diskusi interaktif pada acara TV yang mereka tonton mempunyai andil besar dalam mendidik masyarakat semakin kritis dan cerdas dalam menilai suatu analisis para pakar dan tokoh masyarakat.

Berkembangnya budaya penelitian pada suatu masyarakat mencerminkan kecerdasan suatu masyarakat. Sebagai gambaran, masyarakat di sekitar Balai

Besar Penelitian dan Pengembangan Padi dan Serealia Lainnya (di daerah Sukamandi), yang "mengintip" kegiatan penelitian padi, dapat dikatakan masyarakat yang cerdas. Mereka secara sadar berusaha "mencuri" hasil penelitian bibit padi yang belum teruji dengan baik. Tanpa disadari "budaya penelitian" telah menjangkiti cara berpikir dan sikap hidup mereka, dan bahkan mereka sekan-akan telah menjadi bagian dari komunitas peneliti. Bahkan dalam beberapa hal, mereka bisa lebih "pintar" dari penelitiannya sendiri. Di bidang sosial ekonomi hampir tidak ada batas yang berarti antara peneliti di satu sisi dengan kalangan masyarakat daerah yang sudah cerdas di sisi lain.

Hampir dapat dipastikan, penelitian apa saja akan diterima oleh masyarakat daerah asalkan dinilai akan dapat memberikan manfaat pada mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Justru yang sering dihadapi masyarakat bahwa banyak kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dan asing hanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan penyandang dana. Bahkan terdapat kesan yang lebih menyakitkan bahwa tidak sedikit kegiatan penelitian sosial-ekonomi yang mereka lakukan tidak memberikan manfaat yang berarti bagi kemajuan masyarakat daerah. Akhir-akhir ini kekritisian dan kecerdasan masyarakat di daerah sudah banyak mengalami kemajuan, terutama dikaitkan untuk menyeleksi tentang penelitian apa yang sesuai untuk kepentingan mereka. Beberapa masyarakat di daerah sudah menunjukkan keberanian untuk mengusir peneliti manakala peneliti tidak mampu menunjukkan keberpihakannya untuk membantu masyarakat.

FASILITASI BIROKRASI UNTUK PENELITIAN

Istilah birokrasi yang dimaksud adalah birokrasi pemerintah daerah. Dengan menerapkan asas *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menciptakan birokrasi yang cerdas, cenderung menyatu dengan kepentingan masyarakat banyak, dan kondusif terhadap kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian di daerah tidak akan berjalan baik tanpa dukungan fasilitasi birokrasi daerah. Jika fasilitasi birokrasi buruk, maka akan buruk pula dukungan terhadap kegiatan penelitian. Dengan kata lain buruknya kinerja birokrasi di daerah akan berdampak buruk terhadap penelitian, dan pada gilirannya mengganjal kemajuan masyarakat di daerah itu sendiri.

Fasilitasi birokrasi dalam kegiatan penelitian harus dilandaskan pada kemajuan masyarakat di daerah. Pengertian fasilitas mencakup perijinan, seleksi, pengawasan, penghentian kegiatan, dan pendampingan terhadap kegiatan penelitian di daerah. Dasar pemberian fasilitasi, dengan demikian, mencakup penilaian terhadap manfaat dari kegiatan penelitian terhadap kemajuan suatu daerah dan masyarakatnya. Manfaat yang dimaksud mencakup antara lain:

- a. Apakah dari hasil penelitian dapat dirumuskan alternatif kebijakan pembangunan daerah yang bernilai strategis untuk kemajuan dan pembangunan daerah? (Perlu diketengahkan bahwa pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten/kota, mempunyai kewenangan dalam mengatur lalu lintas kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat daerah).
- b. Apakah dari kegiatan penelitian dapat dijadikan media transfer pengetahuan kepada aparat dan masyarakat daerah setempat? (Kegiatan penelitian harus dapat dijadikan instrumen untuk melakukan *capacity building* bagi aparat dan masyarakat daerah, mengingat penelitian umumnya terkait dengan inovasi).
- c. Apakah dari kegiatan suatu penelitian dapat dijadikan media atau jalur untuk memperoleh manfaat langsung melalui aliran uang (masuk) dari luar daerah? (Dampak kegiatan penelitian dan hasilnya harus dapat diprediksi untuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan daerah).
- d. Apakah dari kegiatan penelitian pada akhirnya dapat memberikan "peninggalan berharga" (misalnya) dalam bentuk teknologi dan peralatan mutakhir? (Dari beberapa khusus, dari penelitian pertanian padi sawah, peneliti menghibahkan berbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi. Peralatan ini dapat dijadikan "prototipe" untuk ditiru dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat setempat).

Pilihan pemberian fasilitasi terhadap kegiatan penelitian telah mendesak dilakukan. Namun demikian, pemberian fasilitasi yang dimaksud perlu disesuaikan dengan seberapa jauh suatu kegiatan penelitian memberikan manfaat atau mudharat bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Persyaratan fasilitasi adalah adanya proposal penelitian yang bersifat operasional. Dari proposal yang dimaksud dapat diketahui tentang: (1) tujuan dan hasil penelitian, (2) dampak lanjut dari hasil penelitian, (3) pendanaan penelitian, (4) peneliti dan kualifikasinya, dan (5) peralatan dan sarana yang digunakan selama kegiatan penelitian. Ketidaksiesuaian antara proposal dengan yang dilakukan peneliti di lapangan dapat dilakukan tindakan antara lain berupa:

- a. Tidak diberi ijin untuk dilakukan penelitian, karena dikhawatirkan (misalnya) bahwa dari hasil kegiatan penelitian akan menciptakan distabilisasi dan disharmonisasi dalam masyarakat, separatisme, dan gerakan radikal yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat setempat.
- b. Pemberian ijin disertai dengan penyederhanaan skop kegiatan penelitian, karena adanya berbagai pertimbangan yang terkait dengan manfaat bagi kemajuan daerah dan masyarakat.
- c. Penghentian kegiatan penelitian, setelah diijinkan, karena dalam pelaksanaan di lapangan menyimpang dari proposal penelitian (tanpa disertai alasan yang dapat diterima secara keilmuan, kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat).

- d. Penjadwalan ulang (atau bahkan penghentian) kegiatan penelitian, karena adanya gejala yang tidak sejalan dengan kepentingan kemajuan daerah dan masyarakatnya, hingga peneliti mampu meyakinkan dan menggaransi bahwa penelitian tetap sesuai dengan proposal.
- e. Pemberian ijin disertai dengan pendampingan oleh tenaga ahli daerah, sebagai bagian dari pengawasan langsung dan/atau kepentingan transfer pengetahuan. (Ini berlaku pada kegiatan penelitian yang bersifat sensitif atau sangat diperlukan bagi transfer pengetahuan bagi aparat atau peneliti daerah).
- f. Pelarangan total terhadap kegiatan penelitian, karena bukan saja dapat dinilai sangat bertentangan serta tidak sejalan dengan kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat, melainkan juga akan berimplikasi pada "pembodohan" masyarakat banyak. Misalnya dari proses dan hasil kegiatan penelitian dapat menyuburkan kegiatan terorisme, *money laundering*, dan konflik sosial.

Kegiatan penelitian bagi kemajuan daerah sangat dibutuhkan. Dengan alasan tersebut, banyak daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, membentuk lembaga penelitian yang dikenal dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Sesuai dengan otonomi daerah (UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah), membentuk Balitbangda merupakan bagian dari kewenangan daerah. Hanya saja, efektivitas fasilitasi kegiatan penelitian tidak harus ditempuh dengan pembentukan balitbangda. Kasus di Propinsi Jawa Barat (2010), penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah tidak lagi dilakukan sendiri oleh Balitbangda, melainkan telah diintegrasikan dalam kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Alasan pengintegrasian tersebut adalah dalam rangka perampingan struktur birokrasi.

Dihapusnya Balitbangda tidak berarti pelemahan terhadap fasilitasi penelitian untuk kemajuan daerah. Fasilitasi kegiatan penelitian yang dimaksud seyogyanya ditekankan pada penguatan tenaga ahli dan peneliti, dan penyediaan dana penelitian yang terancang dengan baik. Akan lebih baik dan dapat dipertanggung-jawabkan secara publik jika fasilitasi kegiatan penelitian diperkuat dengan regulasi daerah (Peraturan Daerah, Perda). Dibangunnya kelembagaan interaktif antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kemajuan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

PENUTUP

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kemajuan di bidang sosio-budaya, ekonomi, dan politik, sangat memerlukan dukungan kegiatan penelitian. Semakin baik kegiatan perencanaan kemajuan suatu daerah dibuat, maka semakin besar memerlukan

dukungan inovasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral dari kepentingan. Siapa yang menguasai penelitian maka mereka-lah yang berhak untuk memegang tongkat kemajuan peradaban.

Perkembangan kegiatan penelitian di daerah telah diterima sebagai kenyataan, dan menjadi bagian integral dari kemajuan daerah dan masyarakatnya. Siapa yang menguasai dan melakukan kegiatan penelitian dengan baik, maka merekalah yang mempunyai daya saing tinggi untuk maju. Sejalan dengan tuntutan inovasi dan kebutuhan untuk memacu kemajuan daerah, fasilitasi kegiatan penelitian di daerah sudah mendesak dilakukan. Fasilitasi dilakukan dengan memperhatikan asas kepentingan kemajuan dan daya saing daerah, pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap kegiatan penelitian yang berdampak strategis bagi kemajuan daerah dan masyarakat perlu dilakukan fasilitasi khusus. Pemberian fasilitasi tersebut antara lain dalam bentuk pemberian perijinan, pemberian ijin disertai dengan bantuan tenaga pendamping khusus, dan pemberian ijin dengan dibarengi pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah. Sementara kegiatan penelitian yang dinilai berdampak buruk atau tidak sejalan dengan semangat memajukan daerah dan masyarakatnya, pemberian fasilitas dapat berupa pemberian ijin secara terbatas, penghentian kegiatan, hingga pelarangan kegiatan.

Sebaiknya antara penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu kesatuan kendali kelembagaan. Oleh sebab itu, antara kegiatan yang dilakukan Balitbangda dan Bappeda harus berada dalam satu atap koordinasi. Untuk perampingan struktur birokrasi, ada baiknya kegiatan penelitian untuk kemajuan daerah dapat diselenggarakan di bawah kendali Bappeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arndt, H.W. 1994. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Cahyono, E. 2009. Karesidenan Pekalongan Kurun *Culturstiesel*: Masyarakat Pribumi Menyongsong Pabrik Gula. <http://members.fortunecity.com/edicahy/thesis/bab1.htm>. [02/01/10].
- Collett, R.T. 2009. The Ecology of Tropical East Asia. Oxford University Press. London.
- de Groot, A.D. 1961. Methodology: Principles of Research and Thinking in Behavioural Sciences. The Hague. London. http://books.google.co.id/books?id=ki0bnVthmjAC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=empirical+cycle&source=bl&ots=YzDuXDuvDq&sig=D660cPEaYxyrUTCILD5Ib6by1mE&hl=id&ei=_HvES9fyL4XGrAfP6tD8Dg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CDMQ6AEwBw#v=onepage&q=empirical%20cycle&f=false. [13/04/10].

- Elson, R.E. 2009. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Serambi. Jakarta.
- Geertz, C. 1970. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. University of California Press. California. http://dannypress.com/h/Agricultural_Involution.html. [10/03/10].
- Geertz, C. 1976. *Religion of Java*. The University of Chicago Press. Chicago. <http://www.press.uchicago.edu/presssite/metadata.epl?mode=synopsis&bookkey=3627129>. [10/03/10].
- Perkins, J. 2004. Confession of an Economics Hitman. http://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man. [10/03/10].
- Perkins, J. 2009. John Perkins; Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional. (Ufuk Press. Jakarta). *Koran Jakarta*, 19 Maret 2009. <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=3654>. [03/05/2010].
- Pranadji, T. 2009. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Perdesaan: Kajian pada Kasus Agribisnis Padi Sawah. Kelembagaan DAS. (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: "Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasionalnya", diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian, 2 Oktober 2003, di Bogor. <http://kelebagaandas.wordpress.com/reformasi-kelembagaan/tri-pranadji/> [24/12/09] atau <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ind/Mono25-01> [07/02/10].
- Pranadji, T. 2010. *Petani, Modal Sosial, dan Reforma Agraria: Menuju Kerangka Strategi Pembangunan Pertanian 2025*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Vlekke, B.H.M. 2009. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. KPG dan Freedom Institute. Jakarta.